



**PAPER – OPEN ACCESS**

## Community Inclusion Through Enhancing Social, Economic, and Legal Resilience of Women Return Migrants in Indramayu Regency

Author : Harmona Daulay, dkk.  
DOI : 10.32734/lwsa.v8i2.2431  
Electronic ISSN : 2654-7066  
Print ISSN : 2654-7058

*Volume 8 Issue 2 – 2025 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



# Community Inclusion Through Enhancing Social, Economic, and Legal Resilience of Women Return Migrants in Indramayu Regency

Harmona Daulay<sup>1</sup>, Detania Sukarja<sup>1</sup>, Erna Ermawati Chotim<sup>2</sup>, Sally Marisa Sihombing<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sumatera Utara, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Nasional, Indonesia

talenta@usu.ac.id

## Abstrak

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan resiliensi sosial (gender), hukum, dan ekonomi, perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Indramayu, yang sering kali menghadapi berbagai tantangan pasca kepulangan mereka. Dilaksanakan pada Agustus 2024 di Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu, program ini mencakup sosialisasi interaktif melalui ceramah, FGD, serta praktik langsung pembuatan rencana keuangan. Ketidakadilan gender, kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum, dan keterbatasan keterampilan ekonomi menjadi hambatan bagi PMI untuk berkembang, sejalan dengan fokus SDGs nomor 5 tentang kesetaraan gender. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang hak-hak mereka, namun diperlukan pendampingan berkelanjutan. Disarankan adanya kerjasama pemerintah, NGO, dan yayasan untuk keberlanjutan program.

**Kata Kunci:** Pekerja Migran Indonesia; resiliensi sosial; hukum; ekonomi

## Abstract

*This community service aims to enhance the social (gender), legal, and economic resilience of female Indonesian Return Migrants (PMI) in Indramayu, who often face various challenges after returning home. Conducted in August 2024 at Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu, the program included interactive socialization through lectures, focus group discussions (FGD), and hands-on financial planning exercises. Gender inequality, lack of understanding of legal rights, and limited economic skills were identified as barriers to the development of PMI, in line with SDGs Goal 5 on gender equality. The results showed improved participants' understanding of their rights, but ongoing support is essential. Collaboration between the government, NGOs, and the foundation is recommended for program sustainability.*

**Keywords:** Indonesian Return Migrants; social resilience; legal; economic

## 1. Pendahuluan

Konsep kesejahteraan dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengacu pada kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan yang layak, mengembangkan potensi diri, dan menjalankan fungsi sosial mereka secara optimal. Suharto [3] menjelaskan bahwa kesejahteraan mencakup berbagai upaya manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Dimensi ini tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi dan fisik, tetapi juga memperhatikan elemen sosial, mental, serta spiritual. Konsep kesejahteraan komunitas bertujuan untuk menciptakan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Salah satu tujuan utama pemberdayaan komunitas adalah mendorong individu dan kelompok masyarakat untuk menjadi lebih mandiri, memanfaatkan peluang yang ada, serta mengambil keputusan dengan penuh keberanian.

Umumnya suatu komunitas dalam masyarakat memiliki permasalahan sosial yang signifikan. Permasalahan sosial tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial dan kesejahteraan komunitas tersebut. Beberapa masalah sosial yang dihadapi komunitas adalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi; kesehatan dan akses terhadap layanan kesehatan; pendidikan dan akses terhadap pendidikan berkualitas; dan permasalahan sosial dan kesejahteraan mental. Pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah sosial tersebut menjadi landasan bagi upaya-upaya pemberdayaan komunitas dan pengembangan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama perempuan yang bekerja sebagai buruh migran, termasuk salah satu kelompok masyarakat yang menghadapi berbagai masalah sosial. Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sejak tahun 2010 hingga 2020, terdapat tren peningkatan jumlah perempuan yang bekerja sebagai PMI, dengan rata-rata proporsi sebesar 63%. Selanjutnya, data menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2018 hingga 2022, sebanyak 348.146 PMI tercatat kembali ke Indonesia, dengan Jawa Tengah sebagai daerah asal PMI terbanyak, yaitu sebanyak 86.435 orang.

Salah satu masalah utama yang sering dihadapi oleh PMI setelah kembali ke tanah air adalah perubahan aktivitas ekonomi dan sosial, serta pola hidup yang menjadi lebih konsumtif bahkan cenderung hedonis. Hal ini disebabkan oleh rendahnya keterampilan dalam memanfaatkan hasil kerja atau remitansi yang mereka peroleh untuk kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Bank Indonesia (2021) melaporkan bahwa total remitansi yang dikirimkan oleh PMI mencapai Rp133 triliun pada tahun 2020. Namun, angka ini belum mencakup dana yang dikirim melalui jalur non-perbankan atau pola tradisional. Sebagian besar remitansi hanya digunakan secara sepihak untuk kebutuhan keluarga atau pembangunan fisik rumah tanpa perencanaan untuk keberlanjutan kehidupan di masa mendatang.

Setelah hasil dari bekerja sebagai PMI tersebut habis, banyak dari mereka menghadapi masalah baru, seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa di antaranya bekerja serabutan, menjadi buruh tani, atau mencoba keberuntungan di kota besar sebagai buruh pabrik atau asisten rumah tangga. Namun, peluang kerja yang tersedia sangat terbatas, sehingga keberadaan mereka sering kali menambah angka pengangguran di daerah asal. Situasi ini menempatkan rumah tangga PMI dalam siklus migrasi yang terus berulang tanpa solusi yang jelas [6].

Berdasarkan keadaan PMI yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan tersebut, dibutuhkan adanya pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan solusi yang berkelanjutan. Sebab baik PMI sendiri maupun keluarganya membutuhkan pekerjaan agar keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan dilakukannya pemberdayaan ini, tidak hanya dapat mengatasi solusi dari permasalahan tersebut, akan tetapi juga menciptakan PMI serta keluarganya menjadi mandiri dan termotivasi untuk mencari peluang dan kesempatan dalam pemanfaatan terhadap sumber daya.

Pemberian wawasan terhadap perlindungan hukum juga diperlukan untuk para pekerja migran, khususnya perempuan. Hal ini penting karena perempuan adalah kelompok yang paling banyak menghadapi tantangan dalam migrasi. Mereka sering menjadi korban ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender di berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, budaya, lingkungan, pendidikan, dan ekonomi, sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Pemberian perlindungan hukum bagi pekerja migran perempuan bertujuan untuk menjamin keamanan mereka dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Kekerasan tersebut meliputi pelecehan, pemerkosaan, penyiksaan, penganiayaan, pembunuhan, hingga pengusiran. Perlindungan hukum ini dirancang untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh individu, kelompok, maupun negara terhadap pekerja migran perempuan.

Pentingnya pemahaman isu gender terkait dengan pemetaan potensi perempuan sebagai pekerja disektor publik menjadi isu yang relevan juga dengan PMI ini. Penguatan, pemberian wawasan dan pendampingan dalam sosialisasi untuk menyadarkan kesadaran sensitivitas gender dan dapat menghasilkan internalisasi yang baik untuk wawasan dan pengetahuan dari para PMI. Hal ini membuktikan suatu proses pendampingan kepada para PMI sehingga pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini sangat dibutuhkan perempuan pekerja migran dan keluarga mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah-masalah utama yang dihadapi oleh PMI, khususnya perempuan pekerja migran di Kabupaten Indramayu, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman tentang pengelolaan remitansi dan penguatan ekonomi: PMI sering kali mengalami kesulitan dalam mengelola hasil kerja (remitansi) secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara jangka panjang.
2. Kurangnya wawasan dan pemahaman tentang perlindungan hukum: PMI, khususnya perempuan, kurang memiliki akses informasi yang memadai tentang hak-hak hukum yang melindungi mereka, baik saat bekerja di luar negeri maupun setelah kembali ke Indonesia.
3. Minimnya kesadaran tentang isu kesetaraan gender: Belum ada pemahaman yang memadai tentang pentingnya kesetaraan gender dan ketidakadilan gender dalam konteks internasional dan nasional, yang mempengaruhi perempuan PMI dalam menjalankan peran sosial dan ekonominya di masyarakat.

Program pengabdian ini dirancang untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, dengan memberikan solusi berupa pemberdayaan ekonomi, pendampingan hukum, serta sosialisasi isu kesetaraan gender kepada perempuan pekerja migran dan keluarganya.

## 2. Metode Penelitian

Adapun yang akan diterapkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini meliputi:

1. Mengkaji kasus-kasus aktual tentang permasalahan ekonomi yang dialami oleh perempuan PMI.
2. Melaksanakan sosialisasi dan forum pembelajaran tentang resiliensi hukum, ekonomi dan sosial juga perspektif gender
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program ini dengan mengambil sampel dari beberapa keluarga PMI dan melibatkan mereka dalam forum diskusi yang diadakan bersama komunitas Selendang Putra Dharma Ayu.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan komunitas, khususnya bagi perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMI), program integrasi yang berfokus pada resiliensi sosial, hukum, dan ekonomi menjadi sangat penting. Hasil dari pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa perempuan PMI sering kali menghadapi berbagai tantangan setelah kembali ke tanah air, termasuk ketidakadilan gender, minimnya pemahaman tentang hak-hak hukum, serta kesulitan dalam mengelola keuangan. Melalui serangkaian sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan di Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu, Indramayu, program ini berhasil memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para peserta mengenai isu-isu krusial tersebut. Diskusi yang diadakan mengungkap bahwa peningkatan kapasitas dalam hal sensitivitas gender, pengetahuan hukum, dan pengelolaan ekonomi tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri para PMI, tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam masyarakat, memungkinkan mereka untuk lebih mandiri dan berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan keluarga dan komunitas.

1. Pelaksanaan Sosialisasi tentang Aspek Gender untuk Pekerja Migran Indonesia Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu  
Pelaksanaan kegiatan sosialisasi untuk Pekerja Migran Indonesia Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2024, dari pukul 09.00 hingga 11.00 WIB. Kegiatan ini dirancang untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran para pekerja migran tentang isu-isu gender dan kekerasan berbasis gender. Acara ini diikuti oleh 20 peserta yang terdiri dari 15 orang pekerja migran perempuan dan 5 orang pekerja migran laki-laki, sebagian besar di antaranya adalah pekerja migran yang aktif terlibat dalam kegiatan pendampingan di yayasan.

Narasumber utama, Dr. Harmona Daulay, M.Si. dari Universitas Sumatera Utara, menyampaikan materi tentang konsep gender, ketidakadilan gender, dan dampaknya bagi perempuan pekerja migran. Penyajian materi dilengkapi dengan video atraktif, dan sesi dialog serta kuis interaktif yang mendorong partisipasi aktif peserta. Sesi storytelling, yang menggali pengalaman nyata terkait isu gender, memberikan sentuhan emosional dan relevansi praktis bagi peserta.



Gambar 1. Pemaparan Materi terkait Isu Gender yang dialami oleh Perempuan Pekerja Migran

Keseluruhan acara ini memberikan dampak positif, dengan peserta mengaku mendapatkan wawasan baru dan motivasi untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Kegiatan ini tidak hanya menambah pengetahuan mereka, tetapi juga menjadi inspirasi untuk terus aktif dalam upaya mengatasi ketidakadilan gender dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pelaksanaan Sosialisasi tentang Aspek Ekonomi untuk Pekerja Migran Indonesia Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu  
Selain fokus pada isu gender, kegiatan pengabdian ini juga memberikan perhatian khusus pada aspek resiliensi ekonomi bagi para pekerja migran. Acara ini dilaksanakan pada hari yang sama, 8 Agustus 2024, dengan waktu yang berlanjut dari sesi sebelumnya, yakni pukul 11.00 sampai dengan 13.00 WIB, dengan komposisi peserta yang sama dengan sesi sebelumnya.

Materi tentang resiliensi ekonomi disampaikan oleh Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si., dari Universitas Nasional yang juga menjadi mitra kolaborasi dalam kegiatan ini. Dalam sesi ini, beliau membahas secara mendalam tentang pentingnya persiapan finansial bagi para migran yang akan memasuki masa purna tugas. Beliau juga menjelaskan secara komprehensif bagaimana perencanaan keuangan yang matang dapat membantu para pekerja migran menghadapi tantangan ekonomi pasca

bekerja di luar negeri. Materi yang disampaikan mencakup prinsip-prinsip dasar perencanaan keuangan, yang dimulai dari fase pra-purna migran hingga pasca-purna migran.



Gambar 2. Pemaparan Materi Resiliensi Ekonomi dan Praktik Perencanaan Keuangan bagi PMI

Tidak hanya terbatas pada teori, kegiatan ini juga memandu peserta melalui praktik langsung dalam membuat rencana keuangan. Sesi ini berlangsung dengan sangat dinamis dan interaktif, di mana para peserta diajak untuk merancang rencana keuangan mereka sendiri. Suasana menjadi lebih hidup dengan adanya tanya jawab yang penuh canda tawa, menunjukkan antusiasme peserta dalam memahami dan menerapkan konsep yang telah dipelajari. Kehadiran materi resiliensi ekonomi ini memperkaya pemahaman para pekerja migran, tidak hanya dalam hal kesetaraan gender tetapi juga dalam mempersiapkan masa depan ekonomi mereka. Sesi ini melengkapi keseluruhan acara, memberikan para peserta wawasan yang komprehensif dan bermanfaat untuk menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri dan terencana.

3. Pelaksanaan Sosialisasi tentang Aspek Hukum untuk Pekerja Migran Indonesia Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu  
Setelah sukses menyelenggarakan sosialisasi terkait resiliensi gender dan ekonomi, Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Sumatera Utara (USU) melanjutkan kegiatan dengan fokus pada aspek hukum bagi perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada 17 September 2024 di Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu, dihadiri oleh 20 peserta (18 perempuan dan 2 laki-laki). Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran PMI terkait hak-hak hukum, perlindungan hukum ketenagakerjaan, serta hukum dalam memulai usaha.



Gambar 3. Pemaparan Materi dan Diskusi terkait Resiliensi Hukum bagi Pekerja Migran

Dr. Detania Sukarja, M.Hum., dosen Fakultas Hukum USU, memaparkan berbagai isu terkait kontrak kerja, upah minimum, jaminan sosial, diskriminasi di tempat kerja, hingga penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Selain itu, aspek hukum dalam memulai usaha seperti lisensi bisnis, pajak, serta kontrak bisnis juga dibahas.

Sesi tanya jawab memberikan ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman terkait kekerasan fisik, verbal, atau ekonomi yang mereka hadapi selama bekerja di luar negeri dan setelah kembali ke Indonesia. Diskusi ini memperkuat kesadaran peserta tentang hak-hak hukum dan memberikan dukungan emosional di antara mereka. Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal bagi para PMI untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan meningkatkan keberdayaan hukum di masa depan.

#### 4. Kesimpulan

Pengabdian masyarakat yang dilakukan bekerja sama dengan Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu menjadi langkah awal dalam menangani permasalahan kompleks yang dihadapi oleh perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama terkait resiliensi sosial (gender), hukum, dan ekonomi. Program ini memberikan dampak jangka panjang terhadap pemahaman dan pemberdayaan PMI, sebagian besar di antaranya adalah perempuan. Kegiatan yang meliputi ceramah, diskusi kelompok (FGD), kuis interaktif, dan praktik langsung, dirancang untuk mengembangkan keterampilan praktis serta kesiapan para PMI dalam menghadapi tantangan sosial, hukum, dan ekonomi.

Sosialisasi mengenai kesetaraan gender, resiliensi hukum, dan ekonomi sangat relevan dengan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* poin 5, yaitu “Kesetaraan Gender”. Poin ini menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan di segala aspek kehidupan, termasuk hak-hak hukum, sosial, dan ekonomi. Dalam program ini, pembahasan tentang kekerasan berbasis gender, hak-hak hukum pekerja migran, dan undang-undang perlindungan memberikan kontribusi langsung terhadap penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan yang sering dialami oleh perempuan PMI. Selain itu, program ini meningkatkan sensitivitas dan mendorong tindakan preventif untuk mencegah kekerasan berbasis gender di komunitas mereka.

Program ini diharapkan mampu menciptakan perubahan sosial yang signifikan, menjadikan PMI agen perubahan dalam komunitasnya. Namun, untuk memastikan dampak positif yang berkelanjutan, dukungan tambahan dari pemerintah, yayasan, dan lembaga non-pemerintah sangat diperlukan. Pendampingan hukum yang lebih berkelanjutan serta konsultasi lebih lanjut diperlukan agar PMI mampu melindungi diri dari ancaman hukum di masa depan. Memperluas program ini dengan fokus pada mediasi dan penyelesaian konflik secara non-litigasi sangat penting agar PMI tidak hanya memahami hak-hak mereka, tetapi juga memiliki alat yang memadai untuk memperjuangkannya. Kombinasi antara pemberdayaan hukum, dukungan emosional, dan praktik langsung di lapangan akan menjadi kunci dalam memperkuat resiliensi sosial, ekonomi, dan hukum PMI, serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs poin 5 untuk memastikan bahwa perempuan, termasuk PMI, memiliki akses yang setara terhadap peluang, serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

#### Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sumatera Utara untuk dukungan dana melalui Program Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Kolaborasi Nasional dengan kontrak No. 16529/UN5.4.11.K/PPM/2024 tanggal 21 Mei 2024.

#### Daftar Pustaka

- [1] Aeni, N. (2017). Eksistensi Buruh Migran Perempuan dan Gambaran Kemiskinan Kabupaten Pati. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 13(2), 139–148. <https://doi.org/10.33658/jl.v13i2.101>
- [2] Nova, A. (2020). Perempuan Pekerja Migran. *Jurnal Perempuan*, 25(3), 4–6. [https://www.jurnalperempuan.org/uploads/1/2/2/0/12201443/jp106\\_cjp.pdf](https://www.jurnalperempuan.org/uploads/1/2/2/0/12201443/jp106_cjp.pdf)
- [3] Suharto, Edi (2008). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik* (cetakan kedua). Bandung: Alfabeta
- [4] Ramadani, N. I. (2021). Dampak Psikologis Pengalaman Kerentanan yang Dialami Perempuan Purna Pekerja Migran Indonesia: Studi Kasus pada Kantong Buruh Migran di Kota Makassar. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 16(1), 15–32. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v16i1.4219>
- [5] Saleh, Rahmat, Adnan, R. S., & Raharto, A. (2023). Pemberdayaan komunitas purna Pekerja Migran Indonesia melalui organisasi berbasis komunitas Forum Warga Buruh Migran. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 17(2), 219. <https://doi.org/10.14203/jki.v17i2.754>
- [6] Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2019). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Binamulia Hukum*, 8(1), 107–116. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.42>